

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN

Oleh

Komang Mas Bayu Puspayoga, NIM 2214101204

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri didalam mengadili permohonan praperadilan pada hukum positif Indonesia dan pengaturan pada masa mendatang di Indonesia. Kompetensi relatif perkara praperadilan ialah bagian didalam hukum acara pidana yang mempunyai arti kewenangan mengadili berlandaskan yurisdiksi wilayahnnya. Dalam hukum positif indonesia seperti KUHAP maupun aturan perundangan lainnya tidak diatur secara eksplisit ruang lingkup kompetensi relatif perkara praperadilan. Berlandaskan dari kekosongan norma tersebut, karenanya perlu diadakan pembaharuan hukum melalui formulasi ketentuan aturan perundangan. Penelitian ini bersumber dari berbagai sumber, antara lain hukum perundangan (UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait KUHAP), hukum kasus (putusan PN Palembang dan PN Sekayu), dan hukum konseptual (teori Witanto dan Yahya Harahap). Pendekatan kasus hukum juga dipergunakan, seperti halnya pendekatan undang-undang. Bahan hukum studi ini berasal dari beragam sumber baik primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian bersifat analitis dan deskriptif. Konsep *ius curia novit* bisa dipergunakan untuk menghindari ketiadaan aturan dalam KUHAP serta aturan perundangan lainnya dalam hukum positif Indonesia. Untuk memastikan bahwa pencari keadilan mempunyai kejelasan hukum, beragam prinsip hukum acara pidana, termasuk *locus delicti*, harus dipertimbangkan ketika merumuskan aturan di masa mendatang.

Kata Kunci: Formulasi, Kompetensi Relatif, Praperadilan, Doktrin.

**LEGAL REVIEW OF THE REGULATIONS CONCERNING THE RELATIVE
COMPETENCE OF DISTRICT COURTS IN DECIDING ON PRETRIAL
APPLICATIONS**

By

Komang Mas Bayu Puspayoga, Student ID 2214101204

Department of Law and Civics

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications in Indonesian positive law and future regulations in Indonesia. The relative competence of pretrial cases is part of criminal procedural law which means the authority to adjudicate based on its territorial jurisdiction. In Indonesian positive law such as the KUHAP and other laws and regulations, the scope of relative competence of pretrial cases is not explicitly regulated. To fill this normative void, new legislative measures are required to amend the law. Case law, specifically decisions from the Palembang District Court (number 32/Pid.Pra/2024/PN Plg) and the Sekayu District Court (number 1/Pid.Pra/2025/PN Sky), as well as statutory precedents like Law Number 20 of 2025 pertaining to Criminal Procedure Law, are consulted in this study, and a conceptual approach namely the doctrine of Witanto (locus delicti) and Yahya Harahap (actor secutor firum rei). This study is descriptive and analytical in character, and it draws on a variety of legal sources (primary, secondary, and tertiary) gathered via literature reviews. When it comes to positive law in Indonesia, the ius curia novit concept may be used to circumvent the lack of standards in the KUHAP and other rules and laws. In the law envisioned for the future, formulations should be made taking into account the applicable principles of criminal procedure law, namely locus delicti, to provide legal certainty for those seeking justice.

Keywords: *Formulation, Relative Competence, Pretrial. Doctrine*